

**SKRIPSI**

**PENGAJUAN KLAIM OBAT YANG DITANGGUNG OLEH PT ASKES  
TERHADAP PASIEN YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT  
(STUDI PADA PT ASKES PADANG)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RENI AMELIA  
BP : 06140102**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**PENGAJUAN KLAIM OBAT YANG DITANGGUNG OLEH PT ASKES  
TERHADAP PASIEN YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT  
(STUDI PADA PT ASKES PADANG)**

**(Reni Amelia, 06140102, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Tahun 2010, Jumlah halaman 60 )**

**ABSTRAK**

Semakin berkembangnya tingkat pembangunan saat ini membuat masyarakatnya yang sibuk bekerja dengan tingkat mobilitas yang tinggi dan melakukan aktivitas lainnya. Sehingga membutuhkan sarana pelayanan di bidang kesehatan yang memberikan jaminan atas masalah kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. PT Askes merupakan salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan kesehatan khususnya bagi pegawai negeri sipil. Asuransi Kesehatan pada PT Askes juga semua pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan dari tempat perawatan sampai masalah persepsian obat. Dan pada pembahasan skripsi ini akan dibahas pengajuan klaim obat yang ditanggung oleh PT Askes Padang.

Permasalahan yang dibahas terdiri atas : tata cara dan prosedural pengajuan klaim obat, penyebab terjadinya klaim obat yang diajukan pasien (peserta Askes) dan cara mengatasinya, dan kendala dalam pelaksanaan klaim obat dan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh PT Askes.

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian dalam pengajuan klaim obat yang ditanggung oleh PT Askes banyak mengalami kendala yang dikarenakan oleh para PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) yang terlambat mengajukan klaim kepada PT Askes. Selain itu pasien mengeluhkan ketidaktersediaannya obat (DPHO) pada PPK atau Apotik Askes.

Dalam hal ini PT Askes berusaha aktif menangani permasalahan ini dengan melakukan pengawasan serta kontrol berkala terhadap masing-masing PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di berbagai negara termasuk Indonesia telah membawa pengaruh positif terhadap berbagai bidang kehidupan. Perkembangan di bidang ekonomi ini juga membawa dampak yang sangat besar. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat ekonomi masyarakat Indonesia yang pada umumnya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja di pemerintahan Indonesia. Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga perlu dibina dan dikembangkan tingkat kesejahteraannya. Untuk itu Pemerintah Indonesia itu sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya khususnya pegawai negeri sipil yang telah bekerja di Pemerintahan dalam meningkatkan perkembangan dan pembangunan Negara.

Dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 32 ayat (2) dinyatakan usaha kesejahteraan yang ingin diwujudkan pemerintah itu meliputi program pensiun dan tabungan hari

tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri pegawai negeri sipil.

Makin berkembangnya tingkat pembangunan saat ini membuat masyarakatnya semakin sibuk bekerja dengan tingkat mobilitas yang tinggi dan melakukan aktivitas lainnya. Sehingga menginginkan suatu wadah atau sarana untuk dapat menjaga atau memberikan jaminan atas masalah kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan dalam menghadapi era globalisasi, berupaya meningkatkan kualitas akan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Ini disebabkan karena kualitas jasa dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Implementasi kualitas jasa yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan dengan cara memberikan pelayanan (service) terbaik bagi konsumen dengan tujuan menciptakan kepuasan pasien.

Sebagai salah satu bentuk sarana pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang jasa maka perlu memperhatikan kualitas jasa yang dijadikan indikator oleh para pasien/konsumen baik pasien yang membayar secara langsung, juga pasien pegawai negeri sipil/penerima pensiun yang menggunakan asuransi kesehatan selain itu pasien yang merupakan masyarakat miskin. Hal ini membuat masyarakat yang juga merupakan seorang konsumen memakai jasa asuransi, baik itu asuransi kendaraan, bangunan, dan yang paling penting adalah asuransi kesehatan.

Asuransi itu adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu :

1. Bahwa Tata cara dan prosedural pengajuan klaim obat pada PT Askes mengacu kepada Keputusan Direksi PT Askes (Persero) Nomor 21/Kep/0109 tentang Pedoman Administrasi Pelayanan Kesehatan Askes Sosial PT Askes (Persero). Hal ini terjadi karena masing-masing Rawat Inap di Rumah Sakit mempunyai aturan atau tahapan yang cukup banyak untuk menangani atau memproses masalah pengajuan klaim obat kepada PT Askes, begitu pun dengan prosedural klaim obat.
2. Bahwa penyebab terjadinya klaim obat yang diajukan pasien terhadap pihak Askes, pada kenyataannya banyak pasien yang mengeluhkan tidak tersedianya obat yang diresepkan oleh dokter dimana obat tersebut termasuk obat DPHO di PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) atau apotik yang bekerja sama dengan pihak PT Askes, lalu masih adanya PPK yang memberikan obat diluar DPHO atau obat-obat yang biasa/ yang hafal olehnya saja. Ini tidak baik sebab obat merupakan komponen yang sangat penting dalam masa penyembuhan seorang pasien.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Askes dalam pelaksanaan klaim obat ini adalah PPK

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Daftar Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2006, Bandung
- Barneveld, Van H, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bharatara Karya Aksara, 1980, Jakarta
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, 2004, Jakarta
- Dorhout Mees T.J. Mr, *Verzekeringsrecht*, 1929
- Mashudi, Moch.Chidir.Ali (Alm), *Hukum Asuransi*, PT Mandar Maju, 1998, Bandung
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Kedua Puluh (Edisi Revisi)*, Pradnya Paramita, 1999, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Intermasa, 1986, Bandung

### B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, beserta Keluarganya
- Peraturan Menteri Keuangan No. 52 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran